

No.	Halaman	Baris dari	T e r c e
1.	3	11 atas	Fusdiklat dan
2.	3	13 atas	Dinas2
3.	3	19 bawah	umumnya
4.	3	19 bawah	khususnya, /...
5.	3	14 bawah	urgent
6.	5	4 atas	maka
7.	6	20 atas	dan
8.	6	6 bawah	mulai kalimat menurut s/d Dar
9.	7	1 - 3 atas	
10.	7	4 atas	antara kata mal saan ditambah
11.	7	7 atas	Gubernur di ...
12.	7	15 bawah	MPRS/XXIV
13.	8	20 bawah	antara kata nel dukungan ditamb
14.	11	3 atas	-----
15.	12	10 atas	antara kata ped ini ditambah
16.	15	2 atas	Organization sy
17.	16	2 bawah	semoga bermanfa



k ' Seharusnya

at dan lembaga2 pendidikan POLRI lain  
nya.  
badan2  
khususnya, terutama  
bagi daya upaya modernisasi POLRI  
pada umumnya,  
mendesak  
sehingga  
serta  
dihapus

an Kejak- semua pihak dipilari, termasuk .....

i dan kata

an dan

danya



dihapus  
kebijaksanaan wilayah  
XXIV/1983  
penetapan suatu strategi yang di  
implementasikan terutama dalam  
POLRI dimasa depan  
strategi

Organizational system

Kami berharap bahwa melalui pidato Dies ini kami dapat berhasil memintakan perhatian baik yang kompetent maupun yang berminat terhadap masalah yang amat mendesak, yaitu penemuan Sistem Kepolisian yang tepat untuk masa depan kita yang mampu menjadi haluan yang jelas bagi pengembangan komponen2nya diantaranya adalah komponen Ilmu Kepolisian.

**MASALAH SISTIM KEPOLISIAN  
(Suatu percobaan Penelitian)**

**PIDATO DIES NATALIS**

**DALAM RANGKA  
MEMPERINGATI HARI JADI YANG KE-XXXI  
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN**

Oleh:

**Drs. Bagoes Moedajadi SH.**  
(Brigadir Jenderal Polisi)

**PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN  
JAKARTA 16 JUNI 1977**

MASALAH SISTEM KEPOLISIAN  
(Suatu percobaan Penelitian)



PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN  
JAKARTA 16 JUNI 1977

## MASALAH SISTIM KEPOLISIAN (Suatu Percobaan Penelitian)

---

Yang terhormat,

Bapak Kepala Kepolisian R.I.,  
Bapak yang mewakili Menteri P. & K.,  
Bapak yang mewakili Menteri HANKAM/PANGAB,  
Bapak<sup>2</sup> Ketua dan Anggota Dewan Kurator PTIK,  
Bapak<sup>2</sup> Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar PTIK,  
Bapak<sup>2</sup> Pejabat Teras MABAK,  
Bapak Gubernur PTIK beserta Staf,  
Bapak<sup>2</sup> Pimpinan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya/atau  
yang mewakili,  
Bapak<sup>2</sup> para Guru Besar, Dosen dan Asisten Dosen PTIK,  
Bapak<sup>2</sup> dan Saudara<sup>2</sup> para Alumni dan Mahasiswa PTIK,  
Bapak<sup>2</sup> dan Ibu<sup>2</sup> hadirin yang kami mulyakan.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T. atas segala rahmat dan karuniaNya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, hari ini kita dapat berkumpul untuk memperingati Dies Natalis PTIK yang ke XXXI, yang merupakan suatu hari penting bagi dunia ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi Kepolisian negara R.I., bagi PTIK beserta para alumni pada khususnya, karena merupakan tanda telah dilampauinya suatu tahap lagi dalam perkembangan kehidupan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Karenanya merupakan suatu kehormatan besar sekali bagi kami untuk memperoleh kesempatan pada hari upacara Dies Natalis ini mengucapkan pidato dies sesuai dengan tradisi ilmiah yang berlaku. Kehormatan itu ternyata menjadi beban yang amat berat karena, selaku alumnus dari suatu angkatan PTIK yang masih tergolong junior dan terbatas pengalamannya, kami menyadari sepenuhnya betapa sulitnya untuk menghasilkan suatu pidato dies yang dalam sejarah PTIK mampu ditempatkan dalam bayangan pidato-pidato dies terdahulu yang tidak diragukan lagi baik mutu ilmiahnya maupun nilai kegunaannya. Atas segala kekurangan yang pasti nampak dan terasa dalam usaha kami memenuhi penugasan dan tradisi di atas, kami mohonkan maaf dan pengertian sebesar-besarnya.

## PEMILIHAN JUDUL DAN AJAKANNYA.

Hadirin yang kami mulyakan.

Secara sadar telah dipilih judul yang berbunyi "MASALAH SISTIM KEPOLISIAN" karena beberapa alasan.

Pertama karena sudah sejak lama PTIK mempunyai mata-pelajaran yang pokok materinya menyoroti sistim-sistim kepolisian yang pernah dan masih ada, sehingga menurut hemat kami merupakan suatu langkah wajar apabila pada akhirnya dapat dibuahkan suatu sistim yang tepat untuk dunia kepolisian dari Negara Hukum Republik Indonesia yang kita cintai ini, yang dapat bertahan cukup lama, oleh karena kami menyadari bahwa setiap sistim tidak dapat terpisah dari lingkungannya, sedangkan semua lingkungan (environment) berada dalam keadaan gerak dan perubahan yang terus-menerus.

Alasan kedua sebenarnya merupakan dasar pertimbangan yang pokok.

Seperti diketahui, masa kini dan yang akan datang sedang dan akan diisi dengan suatu usaha besar dari ummat manusia untuk dapat mencapai taraf hidup dan kehidupan yang lebih baik lagi di seluruh dunia, sedangkan dengan keadaan ilmu pengetahuan dan teknologi pada waktu ini sangat dirasakan, bahwa (atau seolah-olah?) lingkungan di mana kita berada sekarang menjadi makin sempit, baik dalam arti ruang maupun dalam arti kekayaan sumber daya alam.

Bagi kita di Indonesia pun, walaupun sebagian terbesar dari wilayah Indonesia masih dapat dikatakan kosong, namun bagi yang berada di Jawa rasanya seperti sudah tidak dapat bernafas leluasa lagi oleh sebab padatnya penduduk serta padatnya persoalan-persoalan politik, pemerintahan, ekonomi dan keamanan yang kita hadapi sehari-hari.

Maka mau tidak mau timbullah kini pertanyaan "bagaimanakah menghadapi dan mengendalikan keadaan lingkungan yang makin bertambah rumit tersebut?"

Untuk menanggulangi situasi itu, maka timbullah "gerakan penyempurnaan Administrasi Negara" dan pengembangan daripada apa yang disebut "Sistim Manajemen Modern".

Sistim manajemen modern dengan "management science"-nya, "systems approach", dan "quantitative reasoning"-nya hendak menanggulangi keadaan negara itu, terutama dari segi HANKAMNAS, secara menyeluruh, secara makro-nasional dan integral.

Di bidang P.U.T.L. pun, melalui Ilmu Wilayah, dikembangkan cara pendekatan yang demikian, begitu pula di bidang transmigrasi, dimana proyek Sitiung merupakan suatu pola transmigrasi yang hendak diterapkan di mana mungkin sebagai suatu "model".

Kami berpendapat, bahwa bagi P.T.I.K. pun sudah tiba waktunya untuk lebih aktif lagi mempersiapkan segala sesuatunya menuju ke "systems approach" dan penerapan "sistim manajemen modern". Dalam rangka ini kami ikut mendesak akan berdirinya "Police Science Centre" secepat mungkin yang akan menjadi Pusat Studi Pengembangan Ilmu Kepolisian modern menjelang Era tahun 2000, tidak hanya untuk mengasuh P.T.I.K., PUSDIKLAT dan DEPLAT-DEPLAT, melainkan untuk menjadi Scientific Staff Agency di dalam usaha modernisasi POLRI dan dinas-dinas Kepolisian diseluruh Indonesia.

Namun, sistim pemikiran tentang Sistim Manajemen Modern, tentang Sistim Pendidikan berdasarkan Systems Approach tersebut di atas, tidak dapat dipisahkan dari Sistim Kepolisian Indonesia sendiri, paling tidak dari Sistim Kepolisian yang menjadi bidang dan ruang lingkup tugas pokok POLRI. Dan justru itulah yang menjadi prasyarat bagi semua daya upaya pendidikan dan latihan di lingkungan POLRI pada umumnya, di P.T.I.K. khususnya, yakni suatu ketegasan atau paling tidak gambaran yang cukup jelas tentang apa yang dikehendaki sebagai Sistim Kepolisian kita.

Oleh sebab itu, maka kami memberanikan diri untuk memilih judul "Masalah Sistim Kepolisian" bagi pidato Dies ini, dengan maksud menguraikan tentang betapa urgent dan pentingnya daya upaya mencari suatu pola atau sistim atau cara penguasaan lingkungan tersebut di atas setepatnya. Dalam daya upaya manusia mencari sistim untuk mengatasi situasi-situasi yang sangat rumit, maka timbullah antara lain Sistim Manajemen Modern. Berbagai usaha telah nampak dilakukan agar sistim tersebut dapat diterapkan di Indonesia secara berhasil, di antaranya adalah dalam lingkungan P.U.T.L. melalui Ilmu Wilayah, dalam lingkungan transmigrasi melalui pola Sitiung serta dalam lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan dengan Manajemen Modernnya. Dapatkah P.T.I.K. berdiam diri dalam Era Pembangunan yang makin meningkat melalui pengetrapan Sistim Manajemen Modern itu ?

Pidato Dies kami ini ingin mengajak terutama para Alumni dan Mahasiswa P.T.I.K. untuk dalam usaha bersama dibawah naungan

Alma Mater, mengabdikan kemampuan dan pengalamannya dalam menemukan suatu konsepsi yang mantap mengenai dunia Kepolisian Indonesia pada umumnya, POLRI pada Khususnya, lengkap dengan manajemennya yang akan menjadi bentuk pengeterapan Sistim Manajemen Modern yang tepat.

Para hadirin yth.

Dengan pemilihan judul "Masalah Sistim Kepolisian" dengan jelas kami ingin agar supaya sistim diartikan dalam arti kesistiman yang tidak dapat dilepaskan dari manajemen modern. Dengan demikian pengertiannya telah diwarnai oleh ciri-ciri tertentu, diantaranya adalah memakai pola berfikir menyeluruh dan integral. Namun, perlu kami kemukakan terlebih dahulu bahwa tidak ada pretensi sedikit-pun pada kami untuk menyatakan bahwa dengan pemilihan judul ini sampai sekarang belum pernah ada Sistim Kepolisian. Sistim Kepolisian sudah ada, namun karena adanya ciri-ciri tertentu di atas, maka Sistim Kepolisian yang masih harus diketemukan itu dapat diperkirakan akan mempunyai perbedaan-perbedaannya dengan Sistim-Sistim Kepolisian yang telah ada.

Oleh karena itu maka seluruh isi pidato dies kami susun dalam empat bagian, masing-masing mengenai berturut-turut masa lampau, masa kini dan masa depan untuk diakhiri dengan suatu kesimpulan.

#### **CARA PEMIKIRAN TENTANG POLRI MASA LAMPAU.**

Adapun dengan masa lampau ingin kami beri batasan waktu yaitu sampai saat integrasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1966. Bukan maksud kami untuk menguraikan masa lampau ini secara panjang lebar. Cukup kami kedepankan beberapa hal yang menurut hemat kami dapat dijadikan tanda-tanda yang secara representatif menggambarkan masa lampau dalam dunia kepolisian. Ciri pertama adalah penekanan dan pengembangan daripada pandangan dan sikap mengabdikan, baik kepada Nusa dan Bangsa serta Negara maupun kepada masyarakat, sehingga sudah berhasil menghapus dan menjauhkan peranan sebagai alat penindas rakyat. Dari segi profesi dilakukan usaha pengisian dengan kemampuan teknis yang berasal dari suatu zaman jauh sebelumnya dan yang diatur oleh peraturan-peraturan lama pula. Salah satu tindakan pembaharuan dalam gerak maju telah timbul untuk ikut memotori perkembangan-perkembangan selanjutnya, yakni : dalam bentuk pendirian Akademi Polisi yang kemudian mendewasakan dirinya menjadi P.T.I.K., yang bukan saja berhasil melahirkan warga-warga POLRI yang dapat ber-

karya baik, melainkan di samping itu juga melahirkan dan mengembangkan suatu ilmu baru dalam jajaran ilmu-ilmu, yaitu Ilmu Kepolisian. P.T.I.K. pada waktu itu dengan sendirinya tidak dapat terlepas dari pengaruh lingkungan masa itu, maka ilmu kepolisian tumbuh dan berkembang dengan tujuan mengabdikan diri kepada peningkatan pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepada Kepolisian Negara R.I. Pengaruh itu nampak sekali dalam pendekatan yang menjiwainya, yaitu untuk sebagian besar digunakan pendekatan hukum dan sebagian kecil pendekatan kepolisian sendiri. Pembicara sendiri merasa dibentuk dan dijadikan dalam lingkungan dan pola fikir yang sedemikian. Rasanya hal itu adalah wajar karena bukanlah masa itu dijiwai oleh kepercayaan bahwa Kepolisian Negara R.I. mampu berdiri sendiri, terlepas dari ikatan-ikatan tradisional? Bukankah — karenanya — menjadi wajar pula adanya keinginan untuk melengkapi diri dengan kemampuan yang dapat memperkuat hasil yang telah dicapai dengan selamat menjelajahi hutan peraturan-peraturan lama dan menemukan tempat yang kokoh kuat dalam tatanan Negara?

Puncak keberhasilan gerak maju itu ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Kepolisian pada tahun 1961.

Tidak dapat disangkal bahwa hasil tadi dapat dicapai berkat usaha-usaha untuk memperkenalkan gagasan, pemikiran dan konsepsi mengenai Kepolisian dalam suatu negara hukum pada umumnya, Kepolisian Negara R.I. dalam Negara Hukum Republik Indonesia pada khususnya. Di antara gagasan dan konsepsi-konsepsi itu dapat disebut karya tulisan Jenderal Drs. SOEPARNO mengenai Kepolisian di Amerika Serikat dalam perbandingan dengan Kepolisian di Indonesia pada tahun 1953 (yang akhirnya berkembang menjadi buku "Sejarah Perkembangan Kepolisian dari Zaman Klasik — Modern" 1971), terjemahan buku "The Police of Britain" karangan Sir John MOYLAN oleh redaksi majalah "Bhayangkara" pada tahun 1953, tulisan mengenai Organisasi Kepolisian Negara oleh K.B.P. I R. ATING NATADIKUSUMAH pada tahun 1955, dan karya yang terkenal dengan nama "NOTA SOEBARKAH" yaitu dari Bapak SOEBARKAH, seorang tokoh PTIK dengan judul Pemandangan tentang Organisasi Polisi Negara pada tahun 1954.

Apabila diteliti maka seluruh karya tulisan-tulisan tadi pada dasarnya menggunakan pendekatan dari segi pengertian organisasi sebagai struktur, belum dari segi "systems", jadi mencakup tugas pokok, fungsi serta struktur organisasinya, dan mengutamakan analisa per-

bandingan Motto yang dianut adalah "Ambillah yang baik dan jauhilah yang buruk, untuk menjadi bahan bagi pembangunan Polisi Indonesia".\*)

Adanya pengaruh dari pandangan hukum, terutama berkat ajaran, asuhan dan dorongan dari almarhum para guru-besar kita yaitu Prof. DJOKOSOETONO mengenai hukum tata-negara dan tata-usaha-negara. Prof. SATOCHID KARTANEGARA mengenai hukum pidana dan Prof. HAZAIRIN mengenai hukum adat, juga terasa sehingga akhirnya bermuara dalam keberhasilan memiliki undang-undang sendiri.

Ternyata kegembiraan dan kebahagiaan yang dirasakan itu tidak mampu berlangsung lama sebab kemudian ternyata bahwa ada satu masalah yang tak terpecahkan melalui undang-undang tadi. Suatu masalah yang sejak adanya "Nota Soebarkah" sudah dicarikan jalan keluarnya, adalah hubungan antara jaksa dan polisi serta antara pamongpraja, khususnya kepala daerah dengan polisi.

Masalah tersebut perlu jawaban yang jelas, oleh sebab fungsi Kepolisian, walaupun POLRI adalah bagian atau unsur daripada ABRI, adalah bagian dari fungsi Pemerintahan.

Dan untuk menutup bagian masa lampau, dan untuk membuka tinjauan mengenai masa kini dapat kiranya kami kemukakan sebagai berikut.

Harus diakui, bahwa pada waktu ini masih banyak di antara kita yang tidak memahami Sistem Pemerintahan Indonesia yang berlaku sekarang, sebagaimana mestinya. Misalnya, masih banyak yang tidak dapat melihat Gubernur sebagai Kepala Wilayah yang mewakili Pemerintah Pusat di Propinsi, sehingga Gubernur di wilayah mewakili Presiden R.I. yang menjadi wakil atau representatif bagi seluruh Negara, dan Kepala Daerah yang hanya mewakili Daerah dan Rakyat Daerah, sehingga mudah sekali timbul salah paham, salah tingkah, dan kesimpang-siuran. Masih banyak yang mengira, bahwa Gubernur adalah wakil daripada Menteri Dalam Negeri saja, padahal menurut Undang-Undang Dasar kedudukan Menteri Dalam Negeri adalah sama dengan menteri-menteri lainnya, yakni sebagai Pembantu Presiden. Dan bilamana Gubernur bertindak sebagai Koordinator Pemerintahan di Wilayah, maka Gubernur di sini bertindak sebagai wakil daripada Presiden/Pemerintah Pusat dan tidak sebagai wakil daripada Menteri Dalam Negeri.

\*) "POLISI INGGRIS" dalam Majalah Bhayangkara, Nomor 1 tahun IV (1953).

dan semua harus tunduk kepada Gubernur, termasuk Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan D.P.R.D.) bilamana sedang menjalankan tugas pembantuan.

Demikianlah, maka Kejaksaan dan Kepolisian pun harus tunduk kepada Gubernur di dalam menegakkan wibawa Negara dan keutuhan Pemerintahan Negara Republik Indonesia di wilayah Propinsi.

Keadaan pada waktu ini memang masih merupakan lanjutan yang tidak banyak berubah secara prinsipial daripada keadaan masa lampau. Sistem kepolisian di masa lampau memang sudah ada, akan tetapi lebih banyak diartikan tata-cara pelaksanaan tugas Kepolisian Negara R.I. secara sistematis. Sistem kepolisian yang sedemikian itu sudah mantap dalam arti materi profesional-teknis, sedangkan yang menyangkut lain-lain aspek, terutama mengenai hubungan fungsional dengan pucuk pimpinan pemerintah dan dengan pamongpraja serta jaksa, lebih-lebih dengan Angkatan Perang, belum memperoleh kematapan.

Ilmu Kepolisian yang berkembang pada masa lampau menurut kesan penulis masih diwarnai oleh pandangan dan pendekatan hukum, sedang yang menyangkut Kepolisian masih belum ada bentuk yang mantap, karena terpengaruh oleh adanya dua aliran dalam Ilmu Kepolisian di negara-negara Barat.

Dengan modal sedemikianlah dimasuki masa integrasi ABRI yang dimulai secara resmi dengan kelahiran Ketetapan MPRS Nomor : TAP MPRS/XXIV/1966. Masa kini yang masih berlangsung sampai sekarang menjadi obyek perhatian dalam pidato dies ini.

### **POLRI MASA KINI.**

Adanya Ketetapan MPRS itu saja sudah menghadapkan POLRI kita kepada suatu hal yang baru sekali, yaitu pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat yang selanjutnya dikenal dengan singkatan KAMTIBMAS, lengkap dengan pengertian kelengkapannya yang disebut matra. Belum sempat POLRI memperoleh kejelasan-kejelasan yang sangat diperlukannya, sudah mulai mengalir gelombang implementasi kebijaksanaan integrasi ABRI yang makin lama makin cepat dan makin luas serta mendalam, ibarat apa yang oleh yang terhormat Prof. Dr. PRAJOEDI dikiaskan sebagai suatu lawine. Berturut-turut POLRI merasa dijejali oleh hal-hal yang terasa baru, di antaranya adalah doktrin Pertahanan-Kemampuan Nasional dan doktrin Perjuangan ABRI yang disebut "CATUR DHARMA EKA KARMA", Keputusan Presiden R.I. Nomor 132 tahun 1967 serta Nomor 79 tahun

1969. Ternyata bahwa pengertian baru KAMTIBMAS yang dilahirkan oleh Ketetapan MPRS tersebut di muka sudah secara langsung dikaitkan dengan tugas pokok POLRI. Bahkan dalam pengkaitannya masih disebut-sebut korelasinya dengan Undang-Undang Pokok Kepolisian.

Adanya perubahan yang bertubi-tubi itu masih ditambah lagi dengan pola-fikir militer yang diintroduksikan dalam sistim organisasi ABRI seperti yang terkandung dalam pengertian-pengertian pembinaan dan penggunaan kekuatan; taktik, teknik dan sistim senjata; komando dan pengendalian; staf umum dan fungsi organik serta banyak lagi yang dapat dikatakan asing bagi kamus POLRI.

Kebingungan yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan tadi lebih terasa lagi pengaruhnya terhadap kepercayaan diri sendiri warga-warganya karena pukulan mental-psikologis yang diderita akibat tidak sedikit tokoh-tokohnya yang hanyut dalam dan oleh banjir pergantian-pergantian yang berlangsung.

Kebingungan timbul oleh karena kedatangan istilah-istilah, idee-idee dan cara-cara baru, dengan sendirinya memerlukan cara berpikir dan gaya hidup baru yang sesuai dengan hal-hal baru tersebut di atas.

Penyesuaian diri kepada istilah-istilah, idee-idee, dan cara-cara atau konsepsi-konsepsi baru itu, hanya dapat ditempuh melalui dukungan program pendidikan dan latihan yang menyeluruh dan dipersiapkan secara se-saksama-saksamanya.

Bukanlah maksud kami untuk melanjutkan uraian mengenai masa kini karena kita semua mengalaminya sendiri, setidak-tidaknya sekarang sedang menjalaninya.

Yang lebih penting adalah untuk meninjau secara se-pintas lalu sampai seberapa jauh Ilmu Kepolisian telah ikut mendharma-bhaktikan dirinya dalam mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh POLRI. Bukankah sistim kepolisian yang pernah merasa ditemukan di masa lampau itu tidak dapat sesuai lagi dengan sistim yang menjadi berlaku sejak tahun 1966, yaitu sistim pertahanan keamanan rakyat semesta atau disingkat SISHANKAMRATA? Bukankah sistim teknis profesional kepolisian yang selama ini mengajarkan sebagai obyek tugas kepolisian adalah apa yang oleh hukum pidana (yang sangat dikuasai oleh alumni PTIK) dikenal dengan tindak pidana, menjadi kurang sesuai lagi apabila dibandingkan dengan SISHANKAMRATA yang berobyekkan ancaman subversi dan perang di mana perbuatan pidana seolah-olah tidak ada tempat? Bukankah sistim pe-

negakan hukum pidana seperti dituangkan antara lain dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian dan Undang-Undang Pokok Kejaksaan ternyata tidak mampu memecahkan masalah penyidikan perkara yang serasi antara pihak-pihak yang bersangkutan?

Adalah merupakan suatu kejutan yang melegakan hati tatkala yang terhormat Bapak Prof. Dr. SLAMET PRAJUDI ATMOSU-DIRDJO SH. dalam pidato Dies Natalis PTIK ke XXX pada tahun 1976 mengumandangkan adanya pandangan baru terhadap perbuatan pidana, yaitu bukan lagi didekati dari sudut yang sempit (kebanyakan dari segi akhlak), melainkan didekati sebagai konflik. Apabila pandangan ini dilanjutkan maka kami menjadi cenderung untuk menarik kesimpulan bahwa ilmu kepolisian di Indonesia sudah sampai pada titik yang sangat desisip dalam perjalanan hidupnya, yaitu tetap berpaling kearah dua aliran ilmu kepolisian di luar negeri dengan menitik-beratkan perhatiannya kepada perbuatan pidana yang didekati dari segi hukum dan kriminologi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sedang berkembang menjadi lingkungan yang penuh dengan perubahan dan konflik sehingga melengkapi dirinya menjadi ilmu tentang konflik dan pengendaliannya dengan fungsi kepolisian?

Berbagai peristiwa dalam masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan obyek tugas polisi sebagai perbuatan pidana saja dengan mudah dapat mengakibatkan tindakan polisi menjadi terlambat seperti dalam peristiwa MUNCAR, peristiwa di BANDUNG yang lalu, bahkan juga berbagai pengalaman dalam pelaksanaan pemilihan umum baru lalu.

Apabila identifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh POLRI seperti disinggung di atas dirangkum dan dicoba dipecahkan dengan menggunakan pendekatan apa yang disebut KAMTIBMAS, maka satu hal jelas akan menampakkan diri secara menyolok yaitu bahwa obyek dari tugas polisi tidaklah mungkin terbatas dan difokuskan pada perbuatan pidana saja. Kalau penemuan ini dijadikan suatu pangkal tolak maka dengan mudah dapat disimpulkan lebih lanjut bahwa profesi kepolisian dan Ilmu Kepolisian yang telah berhasil dikembangkan dan dilembagakan selama ini, terutama selama masa lampau, mengalami kesulitan yang tidak ringan untuk secara efektif dapat dijadikan kelengkapan petugas polisi dalam menghadapi masa konflik itu.

Kembali kami nyatakan di sini betapa tepatnya pernyataan Bapak Prof. PRAJUDI dalam pidato Dies Natalis tahun yang lalu di mana antara lain beliau menegaskan "Dengan studi tentang konflik

itu kita dapat menambah kegunaan daripada Ilmu Kepolisian dan PTIK .....

Pernyataan tersebut sepenuhnya kami dukung. Namun di samping itu kami cenderung untuk menarik kebutuhan akan adanya studi tentang konflik itu lebih lanjut sehingga tepat mengenai obyek dari sistem pertahanan keamanan nasional kita, yaitu meningkat menjadi studi tentang ancaman subversi dimana baik konflik maupun perbuatan pidana menduduki peranan sebagai komponen-komponennya yang tidak dapat dipisahkan.

Suatu langkah yang terasa sudah baik ke arah studi tentang ancaman subversi itu sebenarnya telah dicapai melalui hasil seminar dan loka-karya mengenai penggairahan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan pembinaan KAMTIBMAS bulan Agustus 1976, yang kemudian setelah disempurnakan disusun dalam apa yang diperkenalkan dengan sebutan sistim pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau disingkat SISBINKAMTIBMAS.

Sistim ini dimaksudkan untuk mencakup penanganan terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat secara menyeluruh dan integral. Dikatakan menyeluruh karena penanganannya tidak hanya dilakukan dengan pendekatan dari satu segi saja seperti umpama dari segi hukum saja, dari segi kriminologi saja, melainkan dari segenap segi. Dari segenap segi ini tidaklah cukup asal sudah didekati dari setiap segi sehingga hasil pendekatan dapat disamakan dengan jumlah dari segenap segi tadi. Pendekatan menyeluruh tadi masih harus memenuhi syarat lain yang sama pentingnya, yaitu integral dalam arti saling berkaitan antara pendekatan sektoral tadi.

Kiranya menjadi jelas bahwa sistim kepolisian yang kita miliki sampai sekarang sudah memerlukan penyesuaian dan peningkatannya. Demikian pula keadaannya dengan Ilmu Kepolisian kita.

Mungkin ada sementara pihak yang berpendapat bahwa pernyataan tadi mengandung ketidak-benaran karena ternyata sampai sekarang segala sesuatu tokoh dapat diselesaikan dengan baik. Tentunya dengan pendapat lanjutan bahwa sistim dan Ilmu Kepolisiannya-pun sudah tepat pula.

Terhadap pendirian ini ingin kami kemukakan satu faktor yang amat dominan untuk dilupakan, untuk tidak ikut dipertimbangkan dalam membuat penilaian di atas. Faktor itu adalah faktor 45. Bukankah menjadi kenyataan bahwa penyelesaian banyak masalah sampai kini dapat berhasil karena para pemimpin mempunyai nilai yang sama yang dapat diandalkan setiap waktu, yaitu nilai bersaham dalam perang kemerdekaan? Bukankah menjadi kenyataan pula disamping

itu, bahwa dalam berbagai kesempatan dapat disinyalir adanya perbedaan pendekatan antara penguasa dengan generasi muda ?

Hadirin yang kami mulyakan.

Dengan menyinggung perbedaan pendekatan, terutama dari generasi muda di atas, maka kami sebenarnya telah melangkah melalui gerbang yang membukakan demensi masa yang akan datang, memasuki bagian ketiga dari pidato dies ini.

Berbagai faktor yang diperkirakan akan mewarnai keadaan bangsa dan negara.

Yang pertama adalah pembangunan nasional bertahap. Dalam jangka waktu jangka panjang kiranya dapat diterima umum bahwa tujuan nasional adalah menciptakan kemakmuran yang adil dan merata. Melalui penetapan kebijaksanaan dan strategi nasional maka dapatlah diperoleh kepentingan keamanan nasional, yaitu keamanan jalannya pembangunan nasional. Dalam rangka ini maka sudah tentu perlu lebih dahulu dapat diperkirakan ancaman-ancaman apa saja yang bakal dihadapi oleh bangsa dan negara, sesuai dengan pola-fikir sistem pertahanan keamanan nasional kita. Ancaman terpokok diperkirakan akan datang dari perang yang dikenal sebagai perang revolusioner dari kaum komunis untuk menguasai seluruh dunia dengan ideologinya. Perang revolusioner menyangkut setiap bidang kehidupan bangsa. Medan perang utamanya adalah alam pikiran dari rakyat dan melalui manipulasi peluang-peluang seperti rasa tidak-puas, kebencian, kemelaratan, keadaan tidak-aman yang meluas dan lain-lainnya yang diakibatkan oleh kondisi sosial ekonomi dan politik yang kurang memadai. Masyarakat adalah medium berlangsungnya revolusi dan sekaligus merupakan tujuannya. Dari gambaran pola perang revolusioner demikian itu dapat dinyatakan bahwa di satu pihak perang revolusioner mengancam jalannya pembangunan nasional, akan tetapi di lain pihak pelaksanaan pembangunan nasional yang tidak mencapai tujuannya seperti menimbulkan rasa tidak puas, akibat-sampingan yang negatif serta bermacam konflik, ideologis-politis, sosial-ekonomis, budaya-religius dan lain-lain, justru secara potensiil membuka peluang bagi munculnya perang revolusioner itu sendiri.

Semoga menjadi jelas melalui gambaran singkat tentang ancaman di masa yang akan datang di atas bahwa tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tidak lagi akan cukup dengan formula mencegah dan menindak pelanggaran serta kejahatan saja. Jadi tidak akan cukup pula dengan perumusan tugas pokok POLRI dari masa

lampau. Karenanya juga tidak akan cukup dengan kemampuan-kemampuan dari masa lampau dan mungkin pula dari masa kini.

Kemampuan pertama yang sangat diperlukan adalah kemampuan untuk dapat memahami kedudukan dan peranan tugas POLRI dalam rangka usaha maha besar yang disebut pembangunan nasional. Bahkan dalam rangka Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya adalah memahami strategi nasional yang mendapatkan penjabarannya dalam strategi keamanan nasional. Menurut pengalaman dan penelitian kami kemampuan untuk pengkajian strategis dan pendalaman ini masih perlu sekali dikembangkan dan ditingkatkan. Kemampuan pengkajian strategi katakana mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat saja juga tidak akan cukup. Sebabnya adalah karena untuk mengamankan jalannya pembangunan nasional memerlukan usaha di bidang keamanan yang tidak berdiri sendiri, tidak berada dalam kotaknya sendiri, melainkan yang berkaitan dengan usaha di bidang lain, di bidang politik, sosial ekonomi, agama dan lain-lain. Secara singkatnya dapat dikatakan memerlukan usaha menyeluruh dan integral.

Kemampuan berfikir dan memahami sesuatu secara menyeluruh dan integral inilah sebenarnya yang amat diperlukan. Bahwa hal ini merupakan kebenaran, telah dibuktikan dengan munculnya usaha penyempurnaan dalam usaha pemerintah yang menggambarkan perubahan pola pikir dari sektoral menjadi integral.

Di antaranya adalah pola SITTUNG dalam pelaksanaan transmigrasi. Oleh Menteri TRANSKOPNAKER pola ini disebut dengan lintas sektoral horisontal. Menteri PUTL mengembangkan yang disebut ilmu wilayah.

Yang amat jelas serta tepat adalah apa yang dituliskan oleh Menteri RISET Prof. SUMITRO DJOJHADIKUSUMO dalam bukunya "Indonesia dalam perkembangan dunia — kini dan masa datang". Dalam Bab X dengan judul Indonesia menuju tahun 2000 dinyatakan sebagai berikut :

"Secara sadar kita harus berikhtiar untuk mempengaruhi perkembangan masa depan, sehingga terlaksana suatu kemajuan dan pertumbuhan dalam suasana kestabilan masyarakat dan keadilan sosial. Sebaliknya kita harus senantiasa menyadari, bahwa kebijaksanaan dan tindakan yang kita lakukan dewasa ini, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi masa depan kita dalam jangka panjang. Keputusan dan tindakan kita pada saat ini, tepat atau salah, pasti akan membawa akibat kepada pola kehidupan masyarakat selama sisa abad kedua-puluh ini. Secara umum, penulis sebenarnya termasuk pendukung dari

apa yang disebut "systems approach" dalam menganalisa dan menilai suatu proses perkembangan masyarakat : artinya dengan mengamati totalitas dari segala aspek permasalahan, dan bukannya sekedar memusatkan perhatian pada suatu gejala kemasyarakatan secara berdiri sendiri".

Kami sendiri masih merasa sangat awam dalam kemampuan yang disebut "systems approach" tersebut, namun dalam tingkat belajarpun sudah merasakan kegunaan pendekatan kesistiman dalam rangka menyusun sistim pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Karenanya menurut hemat kami kemampuan pendekatan kesistiman inilah yang amat diperlukan oleh petugas POLRI dalam menghadapi keadaan Indonesia di masa depan.

JOHNSON, KAST dan ROSENZWEIG dalam bukunya "The Theory and Management of Systems" mengemukakan hasil penelitiannya mengenai pendekatan kesistiman sebagai berikut : "Systems thinking has proved appropriate and useful in a wide variety of contexts : military missions, space explorations, pollution control, urban mass transit, ecological balance, law-justice systems and many others".

Bukan hanya untuk pemecahan masalah terbatas pada masalah keamanan untuk menemukan tindakan operasional yang tepat saja kesistiman dapat digunakan melainkan juga untuk mengusahakan penyelenggaraan tindakan tersebut secara efektif dan lebih-lebih lagi secara efisien.

Dalam rangka pembangunan nasional yang masih harus memberikan prioritas pada pembangunan bidang kesejahteraan, maka masalah pemilihan cara-cara pelaksanaan tugas keamanan yang menjamin efektifitas dan efisiensi rasanya menjadi masalah paling kardinal untuk jangka waktu relatif lama. Karena itu di samping kemampuan kesistiman sebagai sarana untuk menganalisa masalah keamanan, kami yakin masih diperlukan pula kemampuan kesistiman yang dipadukan dengan kemampuan menejemen upaya keamanan.

Kemampuan menejemen modernlah yang dihasilkan oleh perpaduan tadi.

Masa depan akan ditandai oleh meningkatnya penggunaan rasio oleh generasi-generasi penerus, sehingga diperkirakan berpikir modern akan meluas.

Pemecahan masalah karenanya juga diperkirakan akan dicapai melalui berpikir modern. Faktor jasa 45 di masa depan sudah tidak akan berpengaruh seperti di masa kini. Mempunyai keberanian moral untuk sekarang memutuskan menanamkan kemampuan berfikir mo-

derm pada generasi-generasi pewaris dan penerus menurut keyakinan kami merupakan putusan yang bijaksana lagi mempunyai nilai strategis yang amat besar.

Dalam lingkungan sedemikian itulah perlu dikembangkan suatu sistim kepolisian Indonesia. Suatu sistim yang bukan mengajarkan keahlian mengenai kepolisian dalam suatu kerakuman, akan tetapi yang mencakup pengertian yang mendalam mengenai kedudukan dan peranan fungsi polisi dalam keseluruhan fungsi-fungsi dari masyarakat dan Negara

Suatu sistim yang bukan hanya pandai menjabarkan kemampuan teknis profesionil kepolisian yang sanggup dihadapkan pada perbuatan kriminal sehari-hari, melainkan lebih-lebih harus sanggup membuah-kan kemampuan menyelenggarakan mencejemen modern terhadap upaya keamanan yang seirama dengan derap kemajuan pembangunan nasional kita. Ilmu Kepolisian sebagai salah satu komponen pendukung sistim kepolisian yang sedemikian rasanya masih harus dikembangkan.

Hadirin yang kami hormati,

Kami rasa telah cukup kami kedepankan dalam pidato Dies Natalis PTIK ke XXXI ini keterangan-keterangan dan masalah-masalah yang menyangkut sistim kepolisian, baik yang telah kita miliki di masa lampau, yang kita pelihara masa kini maupun yang diperkirakan akan diperlukan di masa yang akan datang dengan kesimpulan pokok bahwa suatu sistim kepolisian yang mampu dijadikan komponen yang bermanfaat bagi sistim pembangunan nasional pada khususnya, sistim ketahanan nasional pada umumnya, masih harus dikembangkan.

Suatu modal dasar pada masa kini telah berhasil diketemukan yaitu sistim pembinaan, keamanan dan ketertiban masyarakat yang secara embroinal telah menempatkan dirinya dalam suatu sistim keamanan nasional sebagai sistim induknya.

Hadirin yang kami mulyakan,

Menjelang pengakhiran pidato Dies Natalis Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian ke XXXI ini, izinkanlah kami mengetengahkan paham kami mengenai sistim kepolisian untuk masa depan yang kami susun bermodalkan sistim kepolisian yang kita kenal sampai sekarang, dengan menarik pelajaran dari pengalaman masa kini serta dituntun oleh teori tentang kesistiman.

Dengan mengambil paham JOHNSON dkk mengenai "ORGANIZATION SYSTEM" sebagai pangkal tolak, maka sebagai faktor faktor yang mempengaruhi sistim kepolisian masa depan adalah berturut-turut: sistim lingkungan yang untuk sampai tahun 2000 dapat digambarkan seperti ditulis Prof. SOEMITRO dalam bukunya yang disebut di muka, subsistim tentang nilai-nilai dan tujuan dari sistim sosial Indonesia yang apabila dijabarkan dari nilai-nilai dan tujuan nasional dapat diketemukan nilai-nilai dan tujuan Negara Hukum RI, khususnya nilai-nilai dan tujuan keamanan intern yang mencakup secara holistik kwalita-kwalita **ketertiban, keselamatan dan keadilan**, kemudian subsistim tentang teknik-teknik yang dikembangkan untuk mewujudkan nilai-nilai dan tujuan keamanan termaksud, berturut-turut **kemampuan, fungsi pemerintah di mana fungsi polisi dan penegakan hukum** akan menemukan tempatnya serta sistim senjata sesuai dengan fungsi dan kemampuan yang bersangkutan, diikuti dengan subsistim struktural yang berfokuskan upaya pengorganisasian dari kemampuan, fungsi dan sistim senjata termaksud secara efektif dan efisien sehingga akan tercakup khususnya pengorganisasian **kemampuan, fungsi dan sistim senjata kepolisian** sesuai azas-azas organisasi militer dan akhirnya dilengkapi dengan subsistim psikososial yang terutama mengedepankan **situasi konflik**, dimulai dari konflik perorangan yang meluas sampai konflik sosial. Sebagai kuncinya maka keseluruhan sub-sistim-sub-sistim dari sistim sosial tadi dicakup oleh subsistim tentang manajemen modern, khususnya tentang **manajemen (modern) kepolisian**.

Berdasarkan pola fikir itu maka kami cenderung untuk menyatakan bahwa sistim kepolisian di masa depan mencakup seluruh ikhtiar bangsa dan negara Indonesia untuk secara sadar mempengaruhi perkembangan masa depan yang diperkirakan akan dibayangi oleh situasi konflik, baik sebagai situasi yang menyertai pembangunan nasional maupun sebagai manifestasi dari ancaman perang revolusioner, melalui pelaksanaan fungsi kepolisian secara efektif dan efisien dalam rangka keamanan nasional sehingga dapat dicapai keamanan jalannya pembangunan nasional.

Ilmu Kepolisian tidak boleh ketinggalan dalam perlombaan menuju pencapaian sistim kepolisian modern khususnya, sistim keamanan nasional pada umumnya.

Bersumberkan gagasan mengenai sistim kepolisian masa depan sebagaimana kami sebutkan di muka serta dijiwai oleh keyakinan atas kebenaran ajaran Prof. DJOKOSOETONO tentang aliran ketiga dalam ilmu negara yang memadukan aliran normatif-juridis dengan

aliran empiris-genetis, maka kami menjadi yakin pula bahwa untuk keberhasilan menejemen kepolisian di masa depan diperlukan adanya Ilmu Kepolisian yang bukan disilaukan oleh dua aliran Ilmu Kepolisian di dunia Barat, melainkan yang secara sadar diwujudkan dan dikembangkan sebagai perpaduan dari ilmu-ilmu pengetahuan alam dan ilmu-ilmu pengetahuan sosial secara serasi untuk mendukung menejemen tersebut.

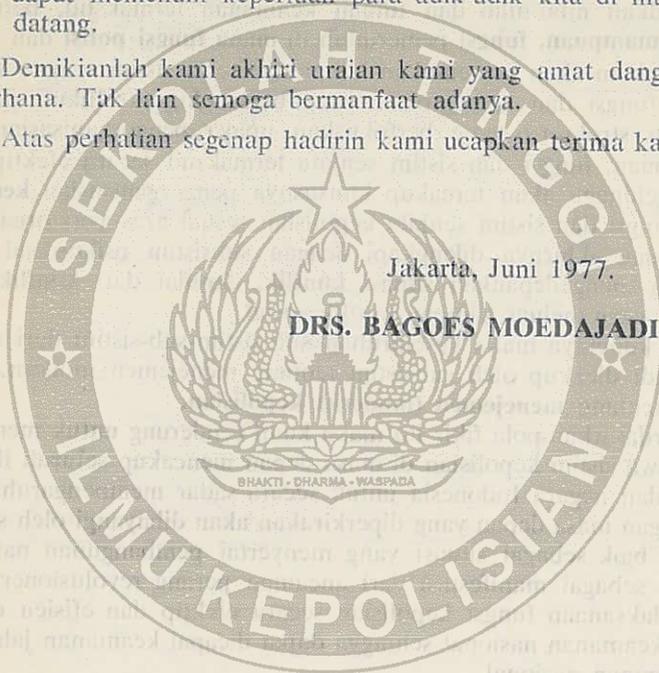
Di atas pundak Garba Wiyata Luhur Bhayangkara Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian beserta para alumni-lah kini diletakkan tugas yang berat tetapi mulya untuk mengembangkan ilmu kepolisian yang dapat memenuhi keperluan para adik-adik kita di masa yang akan datang.

Demikianlah kami akhiri uraian kami yang amat dangkal dan sederhana. Tak lain semoga bermanfaat adanya.

Atas perhatian segenap hadirin kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Juni 1977.

**DRS. BAGOES MOEDAJADI SH.**





PERPUSTAKAAN  
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN  
JAKARTA

